

Homogenisasi Pendidikan: Potret Eksklusifitas Pendidikan Modern¹

Grendi Hendrastomo

Prodi Pend. Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

email: ghendrastomo@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu mekanisme untuk mendorong terjadinya perubahan baik dalam pengetahuan maupun untuk perbaikan ekonomi keluarga. Selama ini pendidikan dijadikan sebagai sarana pembelajar bagi berbagai kalangan, tanpa memandang agama, etnis, tingkat ekonomi maupun kedalaman pengetahuan. Sekolah dijadikan sebagai laboratorium untuk berbagai kalangan berinteraksi saling kenal satu sama lain dan sharing pengalaman hidup tanpa melihat adanya perbedaan. Peserta didik bisa saling mengenal budaya, agama, bahkan gaya dan selera dari berbagai kelas sosial masyarakat tanpa ada sekat. Pendidikan berjalan tanpa pembedaan sekat golongan sehingga ada proses pembelajaran untuk saling kenal dan bersimpati antar peserta didik. Sekolah (negeri) sering dijadikan potret keberagaman peserta didik. Hanya saja belakangan ini potret keberagaman ini mulai mengalami kemunduran. Muncul banyak sekolah yang berbasis pada keseragaman (homogen).

Sekolah homogen ditandai dengan kesamaan karakteristik peserta didik, entah karena persamaan ekonomi, golongan, agama maupun etnisitas. Kecenderungan ini tampaknya semakin marak dengan tumbuhnya sekolah-sekolah elit, berlabel internasional, unggul dalam hal sarana dan prasarana yang tumbuh subur di kota-kota besar, yang uniknya makin digemari masyarakat urban. Sekolah-sekolah tersebut hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas dan tidak memungkinkan bagi golongan ekonomi bawah. Hal yang sama juga muncul disekolah-sekolah berbasis keagamaan.

Homogenisasi sekolah inilah tampaknya yang akan mengubah karakteristik masyarakat kedepan yang lebih mengedepankan kesamaan tanpa memberi ruang pada perbedaan, walaupun pada dasarnya peserta didik tetap perlu bermain dengan teman-teman yang heterogen, sehingga tidak menimbulkan kesan elitis. Artikel ini kemudian akan menganalisis munculnya kembali sekolah heterogen sebagai jawaban untuk mengatasi munculnya segregasi di dalam masyarakat, sekaligus meminimalisir terjadinya konflik antar golongan.

Kata Kunci: Homogenisasi Pendidikan, Keberagaman, Inklusif

A. Pendahuluan

Diskusi mengenai pengembangan sumber daya manusia Indonesia terus menerus digulirkan. Persoalan pelik untuk segera menjawab tantangan global, menyiapkan SDM Indonesia agar mampu bersaing dengan SDM dunia yang semakin berkualitas. Peran pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia terhitung sangat sentral, karena

¹ Dipresentasikan dalam sesi panel Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, 7-8 Mei 2012

berbagai kebijakan mengenai pengembangan sumber daya manusia bertolak pada berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah. Ada asumsi awal bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan memajukan sector ekonomi.

Analoginya cukup simpel, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pemerintah akan menciptakan efek domino terhadap bidang-bidang yang lain, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan akan tercapai ketika pertumbuhan ekonomi meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan tercipta peningkatan lapangan pekerjaan, penurunan angka pengangguran hingga peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan menciptakan efek menetes ke bawah (trickle down effect) akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kalangan atas, sehingga pemerataan pembangunan belum dapat tercapai.

Program pemerataan hasil pembangunan yang diharapkan dapat mencakup seluruh masyarakat, pada kenyataannya justru dinikmati oleh golongan mampu, terutama elit atau kelas menengah yang dekat dengan penguasa. Diperkirakan hanya sekitar 20 % golongan masyarakat menengah bawah yang dapat menikmati hasil pembangunan (Effendi, 2000). Kondisi ini memunculkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin lebar. Akumulasi modal terjadi tetapi hanya pada segelintir orang. Kemudahan akses kerja sama dinikmati pengusaha besar, berbagai bidang usaha mereka kuasai sedangkan masyarakat miskin masih dililit kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Akibatnya, upaya peningkatan kualitas manusia terhambat dan mengganggu pengembangan sumber daya manusia.

Peningkatan dan pengembangan manusia (human development) salah satu dasarnya adalah dengan pendidikan. Pendidikan menjadi faktor kunci dalam pengembangan sumber daya manusia. Esensi dari pendidikan sendiri diharapkan mampu mencetak manusia yang berkompentensi tinggi, mampu bersaing dan mendayagunakan dirinya untuk kemandirian dan meningkatkan potensi yang terkandung dalam dirinya demi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dari keseluruhan variabel sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran penting yang mempengaruhi berbagai variabel sumber daya manusia yang lain. Studi yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh cukup signifikan antara kemampuan membaca dengan peningkatan taraf kehidupan (Thamarajakshi, 1988). Tingkat

pendidikan juga mempengaruhi tinggi rendahnya angka kelahiran. Pada masyarakat yang berpendidikan rendah, angka kelahirannya tergolong tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Selain itu pendidikan juga mempengaruhi variabel sosial lain seperti ukuran keluarga, kesehatan, harapan hidup, nutrisi dan kepekaan sosial.

Pendidikan selain mempengaruhi berbagai variabel sosial juga mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Survey dari beberapa negara berpendapatan rendah menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan efisiensi produksi pertanian. Pada masyarakat yang berpendidikan ada peningkatan efisiensi produksi sebesar 7% dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan (Thamarajakshi, 1988). Peningkatan pendidikan juga mempermudah akses dalam mencari pekerjaan.

Pendidikan menjadi tujuan hampir untuk semua keluarga di Indonesia. Pendidikan menjadi escalator sosial dimana melalui pendidikan status sosial seseorang mampu dikontrol menuju status yang diharapkan. Pentingnya pendidikan membuat hampir semua orang mengalokasikan semua sumber dayanya untuk menyekolahkan penerus/generasi muda dengan menjejali mereka dengan pendidikan yang berkualitas. Kecenderungan tersebut juga dibarengi dengan semakin banyaknya penyedia pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri (via lisensi) yang menawarkan program pendidikan unggulan mulai dari pre-school (PAUD) hingga perguruan tinggi. Masing-masing lembaga tersebut menawarkan sarana dan prasarana belajar yang lengkap, guru yang kompeten dan lingkungan pembelajaran yang nyaman plus lingkungan sosial (pertemanan) yang seimbang. Seimbang disini mereka menawarkan gaya hidup, level status sosial yang sama dan berimbang antar siswa (homogen). Selain itu lembaga-lembaga pendidikan tersebut juga menawarkan pendidikan yang berbasis pada etnis atau agama tertentu untuk menyasar orang tua yang idealismenya masih kuat terutama yang ingin anaknya tumbuh sejak kecil dengan metode belajar yang berkualitas plus ada didikan agama eksklusif yang orang tua inginkan.

Apakah semua itu murah? Apakah semua orang bisa masuk/diterima? Apakah pendidikan yang cenderung mahal, mampu diakses semua kalangan? Tentu jawabannya tidak. Hampir sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan tersebut (sekolah) menarik kontribusi yang cukup besar (mahal) untuk fasilitas dan kualitas yang mereka tawarkan. Pada akhirnya kesan eksklusif menjadi lekat dengan dunia pendidikan. Siswa yang

berasal dari golongan ekonomi mapan bisa memilih dimana mereka akan sekolah, sebaliknya siswa dari golongan menengah bawah pada akhirnya tidak akan punya pilihan. Inilah yang memunculkan gejala eksklusifitas pendidikan karena tidak semua anak/siswa dapat bermain, belajar bersama tanpa ada sekat status sosial, etnis, ras, maupun agama. Akhirnya eksklusifitas justru akan melahirkan diskriminasi. Gejala kemunculan sekolah eksklusif khususnya di wilayah DIY telah tampak, bahkan di tingkat PAUD (berita antaranews.com). Fenomena ini menarik untuk dilihat bukan dalam kapasitas untuk mempertanyakan kualitas sekolah-sekolah tersebut tetapi lebih melihat pada akibat jangka panjangnya pada perkembangan siswa dan kehidupan bermasyarakat yang secara tidak langsung akan memagari siswa-siswa ini perspektif yang diajarkan di kelas dan tidak bisa melihat perspektif yang berbeda, sehingga ada kemungkinan akan melahirkan konflik, pertentangan, gesekan karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan yang heterogen.

Homogenisasi pendidikan kemudian diartikan sebagai keseragaman, harmonisasi yang 'dipaksakan', kesamaan, kesebandingan, sesuatu hal yang memang dibuat sama dan seragam dalam dunia pendidikan, termasuk didalamnya kesamaan, keberimbangan status sosial siswa dan orang tuanya, kesamaan agama siswanya hingga kesamaan etnis siswanya. Kesemuanya tersebut mewujud dalam sekolah-sekolah yang berbasis pada status (prestise)/education francise, dan sekolah berbasis agama, baik tingkat dasar maupun tingkat atas. Homogenisasi disini sama artinya diskriminasi terhadap siswa yang berbeda status sosial, agama atau etnis. Pada akhirnya sekolah yang homogen menjadi sama dengan sekolah eksklusif. Gejala homogenisasi inilah yang kemudian menjadi ancaman bagi dunia pendidikan Indonesia

B. Pendidikan dan Realitas Sosial

Pendidikan pada hakekatnya menjadi proses pembelajaran untuk memberikan bekal pada siswa kehidupan nyata yang akan dihadapi di lingkungan sosial yang nyata pula. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang mengacu tidak hanya pada persoalan materi, pengetahuan, tetapi juga lingkungan yang harunya disesuaikan dengan lingkungan nyata. Inilah sebenarnya realitas sosial yang harus dihadapi dunia pendidikan, dimana sekolah menjadi agen sosialisasi untuk mengajak anak mengenal dunia sosialnya dalam konsep yang heterogen.

Menurut Paulo Freire, (Effendi, A., 2012:5) pendidikan bukan merupakan "menara gading" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Dalam perspektif keragaman budaya, sistem pendidikan nasional harus memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam penerimaan sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perbedaan atas jenis kelamin, agama, ras, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Ironis bila disatu pihak pendidikan diarahkan untuk menghadapi globalisasi dan keterbukaan, bersaing dengan bangsa lain, tetapi disisi lain penghargaan terhadap keragaman dikerdilkan, dikotak-kotakkan berdasarkan afiliasi tertentu. Seharusnya yang dikedepankan adalah penghargaan terhadap nilai-nilai multicultural, multietnis, multiagama

Realitas inilah yang perlu nantinya untuk dikedepankan, mengapa? Dalam kacamata sosiologi, individu akan selalu hidup bermasyarakat, karena dalam masyarakatlah individu akan terpengaruh oleh interaksi sosial. Realitas sosial itu ada diluar individu dan dengan sadar diterima dan menjadi bagian individu. Menurut Simmel (Veeger, 1993:91-95) manusia selalu berkaca pada apa yang ada di lingkungan sosial, ada 4 alasan yang dikemukakan: pertama, masyarakat terdiri dari jaringan relasi antar orang yang menjadikan mereka bersatu. Kehidupan sosial itu terdiri dari jumlah aksi dan reaksi yang tak terbilang banyaknya, pihak-pihak yang terlibat menyesuaikan diri dengan salah satu pola perilaku yang kolektif. Masyarakat berarti membentuk sebuah kehidupan bersama yang relatif egaliter, atas dasar perbedaan. Kedua, relasi-relasi aktif antara orang yang berkelompok atau bermasyarakat, tidak semua sama sifatnya, artinya ada kedinamikaan dan kebhinekaan dalam setiap masyarakat. Ketiga, kesatuan-kesatuan sosial tidak hanya terbentuk dari relasi integrative dan harmonis, sehingga kritik, oposisi, persaingan ketidaksamaan selalu akan ada. Sehingga ketika ada anggapan bahwa kesamaan dan harmoni menjadi dasar interaksi sosial tidak bisa dibenarkan. Keempat, tidak semua kesatuan sosial mempunyai lama waktu dan intensitas yang sama. Dalam konteks ini interaksi individu dalam bermasyarakat memerlukan variasi dalam penyesuaiannya dengan lingkungan.

Keempat factor yang mendorong manusia untuk bermasyarakat memunculkan peran hampir semua lapisan masyarakat, sehingga ketika kemudian manusia dihomogenisasi dalam satu kultur budaya sekolah yang sama ada kemungkinan muncul ketertindasan secara sadar bahwa mereka merasa diri mereka eksklusif padahal diluar kehidupan mereka ada banyak ragam budaya yang harus dibudayakan dalam lingkungan tidak hanya secara materi saja.

Realitas ini yang tidak sadar memunculkan bahaya nyata bagi siswa. Ironisnya kebijakan pendidikanpun ada yang merepresentasikan pola-pola itu, sebagai contoh dimunculkannya sekolah berstandar internasional (SBI) yang sekarang ini yang paling banyak rintisannya.

Kebanyakan RSBI dibuka untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu yang sesuai dengan standar internasional. Tentu saja untuk mencapai tataran international tidak mudah. Dibutuhkan berbagai dukungan mulai dari sarana dan prasarana, standar kelas minimal, kompetensi pengajar hingga ketersediaan alat peraga, buku dan kelengkapan pembelajaran yang memadai. Kesemua itu jelas butuh dana besar. Pertanyaannya simpel dana tersebut berasal dari mana? Tak susah menemukan jawabannya, orang tua muridlah yang wajib menyediakan dana tersebut. Alih-alih kehilangan peminat karena biaya yang lebih mahal dan tidak gratis. Banyak orang tua yang berkecukupan rela mengeluarkan berapa pun dana untuk memasukkan anak mereka ke RSBI. Bagi mereka yang paling penting adalah kualitas dan mutu, dana tidak menjadi masalah. Rasional memang, ditengan persaingan global, ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin minim, tentu perlu diatasi dengan pendidikan yang bermutu.

Menurut Coleman (Ritzer, 2008) dalam teori pilihan rasional, orang bertindak secara sengaja untuk mencapai tujuan, dengan tujuan yang dibangun oleh nilai dan preferensi. Ada dua elemen kunci dalam teori pilihan rasional yaitu actor dan sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan actor dan diinginkannya. Dengan kata lain pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke RSBI merupakan faktor yang bisa dianggap tepat, ketika orang tua dihadapkan pada pendidikan bermutu dan berstandar internasional dengan pendidikan “biasa”

Kemunculan RSBI jelas disatu sisi menjadi penawar dahaga untuk menciptakan pendidikan yang bermutu tinggi. Tetapi disisi lain akan menciptakan kesenjangan kelas

sosial yang semakin tajam. Pendidikan miskin yang diharapkan mampu membantu pengentasan anak putus sekolah justru dianggap sebagai pemberian pendidikan apa adanya. Pihak sekolah akan menjalankan pembelajaran dengan level rendah toh tidak ada biayanya. Orang miskin nyaris mustahil untuk memenuhi keinginan dan cita-cita mereka. Akhirnya tujuan pengembangan sumber daya manusia Indonesia tidak akan pernah tercapai. Si miskin ya akan tetap miskin. Padahal salah satu harapan untuk lepas dari kemiskinan adalah dengan memberikan pendidikan setinggi-tingginya bagi anak-anak mereka.

Merujuk pada pemikiran Marx (Ritzer, 2008) disinilah penindasan terjadi, ketika kelas bawah tidak memiliki akses dan kesempatan untuk bermobilitas secara vertical. Kalau orang kaya punya logika borjuistis dan kapitalis dalam menyekolahkan anak-anak mereka, orang miskin menyekolahkan anak-anaknya berdasarkan sisi pragmatism. Komunitas elite ekonomi memperlakukan sekolah ibarat “pasar” yang wajib hukumnya direbut dengan pertarungan segala kemampuan ekonomi serta harga diri.

Kondisi ini memunculkan semakin lebarnya jurang disparitas. Pendidikan yang diharapkan mampu mengontrol perbaikan kehidupan tidak bisa lagi diharapkan. Konflik kelas sosial bisa muncul akibat RSBI yang diobral pelaksanaannya. Akan muncul kecemburuan dan perlawanan dari kelas bawah akibat dominasi kelas atas yang menguasai semua bidang kehidupan. Disatu sisi komunitas elite bisa menjadikan RSBI sebagai obyek pemuas ambisinya, di sisi lain kelompok masyarakat miskin nyaris mustahil bisa merebut kursi di RSBI.

Pada akhirnya proses pendidikan yang selalu mencita-citakan keadilan bagi semua masyarakat justru menciptakan ketidakadilan yang mewujud. Kasus RSBI hanya satu dari banyak contoh yang lain seperti munculnya pendidikan berbasis agama, pendidikan berbasis etnisitas dan pendidikan berbasis pada status sosial (prestise). Semua lembaga pendidikan tersebut menawarkan kualitas pendidikan berbasis pada identitas kelompok. Apakah lembaga pendidikan saja yang salah? Hampir semua pendidikan yang berbasis pada pasar. Dengan kata lain lembaga pendidikan lahir ketika banyak orang ingin mengkonsumsinya, dalam konsep ekonomi ketika tidak ada permintaan maka tidak akan ada penawaran. Kemunculan lembaga-lembaga pendidikan ini tidak muncul begitu saja tetapi ada peran orang tua yang turut serta menumbuhkan lembaga pendidikan yang eksklusif. Orang tua cenderung mencari kualitas plus prestise

bagi anak-anak mereka. Sehingga didalam sekolah sendiri muncul persaingan status yang ditampilkan melalui benda-benda materi.

C. Pendidikan Inklusif

Solusi dan pendapat untuk meniadakan (mengurangi) homogenisasi pendidikan salah satunya dengan mencoba untuk mengedepankan pendidikan inklusif. Istilah inklusif disini bukan seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, tetapi inklusif dalam arti yang lebih umum. Artinya inklusif disini bukan seperti pendidikan inklusif yang meniadakan hambatan peserta didik yang mengalami kelainan untuk bersekolah di sekolah standard (umum), tetapi inklusif dalam arti tidak eksklusif, terdapat pembauran siswa dari berbagai latar belakang dan strata sosial.

Istilah inklusif diartikan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Istilah inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.

Inklusif disini justru lebih kearah pluralisme, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Penegasan pluralisme adalah ketika diakuinya wacana kelompok, individu, komunitas, sekte dan segala bentuk perbedaan sebagai fakta yang harus diterima dan dipelihara. Dalam pluralisme, keberbedaan diakui adanya dan karenanya bukan ingin dilebur dan disatukan dalam bentuk homogenitas, kesatuan, tunggal, mono dan ika (Ridwan, 2002:77). Pluralisme kemudian dimengerti sebagai kenyataan adanya perbedaan karakter, tingkah polah, perilaku yang barangkali sangat menyebalkan, tetapi harus diterima sebagai realitas yang ada. Pluralisme dalam pendidikan dimunculkan untuk memperlihatkan bahwa adanya siswa pintar, bodoh,

kaya, miskin, berbeda agama, etnis, merupakan suatu keniscayaan yang ada dan memang nyata, sehingga walaupun malu dan tidak ingin bersama dengan siswa bodoh misalnya, tetapi realita tetap ada dan harus diterima sebagai bagian dari ketidaksamaan antar masing-masing individu. Dengan demikian pluralisme akan mendorong munculnya toleransi, saling menghargai dan perubahan pola pikir dan tindakan yang berpijak pada kepentingan bersama. Setiap orang harus menganggap perbedaan sebagai bagian dari kehidupan dan kenyataan, sebab setiap orang hidup ditengah-tengah orang lain, sebagaimana orang lain juga hidup ditengah-tengah banyak orang (Ridwan, 2002:87).

Pluralisme yang dimunculkan dalam pendidikan inklusif merupakan pembuktian amanat UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Hak pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang tidak mengikat ras, agama, latar belakang, dan sebagainya. Apalagi Indonesia juga merupakan negara multikultural. Berbagai agama, beragam suku, beragam budaya, semua ada di Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan kebijakan tentang pendidikan inklusi di Indonesia agar bisa diterapkan secara menyeluruh, dengan kata lain pemerintah dituntut untuk berusaha mewujudkan pencapaian hak setiap warga memperoleh pendidikan tanpa kecuali.

Konsep pendidikan yang inklusif juga didukung oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas tertulis bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Ada dua hal (Mukayanah, 2009) yang perlu ditekankan dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas) di atas. Pertama, mengenai demokratisasi pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa prinsip dalam demokrasi adalah mengutamakan penjaminan hak, termasuk hak dalam pendidikan. Merujuk pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, pendidikan seharusnya merupakan media dan bukan tujuan. Pendidikan hanyalah sarana untuk mendapatkan tujuan. Dan tujuan itu tidak lain adalah menjadikan manusia hasil pendidikan sebagai manusia merdeka lahir maupun batin. Tidak terjajah secara ekonomi, fisik, politik, dan sebagainya. Sedangkan pendiskriditan anak didik dengan cara memisahkan pendidikan mereka dengan masyarakat lain merupakan suatu

bentuk penjajahan secara mental. Pemisahan pendidikan ini hanya akan membunuh potensi yang ada dalam diri anak didik.

Kedua, yang perlu digarisbawahi adalah mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan secara berkeadilan. Sebagaimana yang sudah sering disampaikan, pendidikan merupakan hak. Adalah tidak adil jika satu pihak mendapatkan pendidikan yang layak, sedang pihak lainnya tidak. Bukan keadilan namanya jika setiap orang merasa tidak dihargai satu sama lain. Dan itu yang terjadi dalam pendidikan kita selama ini. Pemisahan antara sekolah umum dan sekolah luar biasa hanyalah salah satu bentuk ketidakadilan. Dan dengan sekolah inklusif, harapan untuk segera merealisasikan penyelenggaraan pendidikan berkeadilan akan segera terpenuhi.

Pada akhirnya pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk semua, tanpa sekat, tanpa melihat status sosial, kemampuan akademis, agama, etnis dan latar belakang siswa. Pendidikan inklusif ingin mengenalkan sejak dini kepada anak-anak supaya mereka mengenal lebih dekat apa itu toleransi, apa itu keberagaman, apa itu kebhinekaan yang ada di Indonesia.

D. Simpulan

Bahaya homogenisasi pendidikan tampak nyata dalam lingkungan lembaga pendidikan. Banyak sekolah bermunculan menawarkan keragaman. Sekolah homogen hanya akan menciptakan siswa dengan satu pandangan yang sama, menjadikan munculnya realitas semu dalam lingkungan sekolah yang berkebalikan dengan realitas nyata di masyarakat yang cenderung heterogen. Homogenisasi pendidikan akan memunculkan konflik dalam jangka panjang, membentuk kelompok eksklusif yang pada akhirnya akan menciptakan diskriminasi dan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan akan menguatkan dikotomi mayoritas-minoritas, kaya-miskin, pintar-bodoh.

Sekolah eksklusif (homogen) seharusnya tidak diperkenankan karena sebagian besar hanya dapat dijangkau kalangan tertentu saja. Pendidikan semacam itu dianggap berbahaya karena tidak membiasakan siswa yang nantinya harus bisa menghadapi lingkungan dengan tantangan yang beragam. Sekolah seharusnya bisa berperan untuk menjembatani siswa ke jenjang berikutnya hingga akhirnya terjun ke masyarakat. Ketika pendidikan eksklusif telah diterapkan sejak dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), misalnya, kemudian berlanjut ke sekolah dasar (SD) yang eksklusif pula,

maka justru akan merugikan siswa itu sendiri, karena siswa tidak pernah tahu lingkungan sosial yang sebenarnya.

Untuk mengatasi dan mengurangi homogenisasi pendidikan perlu kiranya untuk menyuarkan kembali pendidikan untuk semua tanpa melihat latar belakang, memunculkan pendidikan inklusif yang berbasis pada pluralisme dengan menciptakan lingkungan sekolah yang nyata sesuai dengan keadaan lingkungan yang heterogen. Dengan kata lain menciptakan kesadaran akan dunia yang beragam tidak hanya dengan mengajarkan materi seperti multicultural saja, tetapi menciptakan kesadaran akan dunianya melalui keberagaman yang nyata melalui lingkungan sekolah.

Daftar Pustaka

- Bappenas, 1992. Model Terpadu Perencanaan Sumber Daya Manusia Nasional. Jakarta: Bappenas
- Darmaningtyas, 2005, Pendidikan Rusak-Rusakan, Yogyakarta: LKiS
- Effendi, Anwar, 2012, Sekolah sebagai Tempat Pesemaian Nilai Multikulturalisme, [online] tersedia pada URL: <<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132086367/Sekolah%20Multikultura-Wachid.doc>> [diakses pada 25 April 2012]
- Effendi, Tadjuddin, N., 2000. Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- _____, 1993. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Freeman and Thomas, 2005, Consumerism in Education: a comparison between Canada and United Kingdom, International Journal of Educational Management. Vol. 19 No. 2, 2005, pp. 153-177
- Freire and Faundez, 1995, Belajar Bertanya, Pendidikan yang Membebaskan, (terjemahan oleh Dr. S.M. Siahaan), Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Johnson and Stewart, 2007, Education, Ethnicity and Conflict, International Journal of Educational Development No 27, pp 247–251
- Kusmin, Mengantisipasi Kegagalan RSBI [online] tersedia pada URL: <<http://www.radarsemarang.com/community/artikel-untukmu-guruku/3182-mengantisipasi-kegagalan-rsbi.html>> [diakses pada 24 Juni 2009]
- Mukayanah, 2009, Demokratisasi dan Pendidikan keberagaman, [online] tersedia pada URL: <<http://yannahzma.wordpress.com/2009/12/17/demokratisasi-dan-pendidikan-keberagaman/>> [diakses pada 25 April 2012]
- Ridwan, Nur Khalik, 2002, Pluralisme Borjuis, Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur, Yogyakarta: Galang Press
- Ritzer & Goodman, 2008. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Ritzer, 2003. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Supriyoko, Problema Pendidikan Gratis [online] tersedia pada URL: <<http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Problema%20Pendidikan.pdf>> [diakses pada 23 Juni 2009]
- Suyanto, 2006. Dinamika Pendidikan Nasional. Jakarta: PSAP
- Thamarajakshi, R., 1988. Human Resource Development in Asian Countries An Integrated Approach. New Delhi: ARTEP
- Tukiman, Menggugat Pendidikan Gratis [online] tersedia pada URL: <<http://icanxkecil.wordpress.com/2009/04/27/menggugat-pendidikan-gratis/>> [diakses pada 22 Juni 2009]
- Veeger, K.J., 1993, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Jakarta: Gramedia
- Wawa, James, E., 2005. Ironi Pahlawan Devisa. Jakarta: Kompas
<<http://www.antaranews.com/berita/298031/pengamat-sekolah-diy-tak-boleh-eksklusif>> [diakses pada 25 April 2012]

Biodata Penulis

Grendi Hendrastomo, lahir di Yogyakarta 17 Januari 1982, Pendidikan S1 di Jurusan Sosiologi, UGM (2004), S2 Manajemen UGM (2007), S2 Sosiologi UGM (2011). Aktif sebagai pengajar di Program Studi Pendidikan Sosiologi, FIS, UNY sejak 2006, Penggiat Kajian Ilmu Sosial Pribumi di Fistrans Institute. Minat kajiannya pada Sosiologi Budaya dan Kajian Media, Pengembangan Media Pembelajaran. Email: ghendrastomo@yahoo.com; ghendrastomo@uny.ac.id